

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat Islam

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pengertian pemberdayaan masyarakat Islam pada hakikatnya mempunyai arti yang tidak jauh dari arti pemberdayaan warga, sebab Islam sendiri ialah bagian dari warga itu sendiri. Oleh karenanya dalam pembahasan berikut lebih banyak menggunakan pengertian maupun konsep dari pemberdayaan warga dengan cara umum. Tutar pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah cara, metode, membuat serta memberdayakan. Kata dasar pemberdayaan berawal dari kata 'daya' yang maksudnya keahlian buat melaksanakan suatu ataupun keahlian buat berperan.¹

Penafsiran pemberdayaan bisa dimaknai sesuatu usaha yang bermaksud buat penuhi keinginan yang diperlukan serta jadi sesuatu kemauan dari orang, golongan serta warga besar supaya mereka memiliki keahlian dalam memastikan opsi dan keahlian buat mengendalikan lingkungannya dalam penuhi ambisinya. Pemberdayaan mempunyai maksud sesuatu usaha yang dicoba oleh orang ataupun warga supaya berakal untuk dalam penuhi keinginan hidupnya mengarah kehidupan yang lebih aman.²

Sedangkan pengertian masyarakat menurut Linton yaitu sekerumun orang yang sudah lama hidup bersama dan bekerjasama sehingga membentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam warga itu dan mampu untuk membuat tiap orang dalam warga bisa menata dirinya sendiri dan

¹ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 69.

² Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, 70.

sanggup berasumsi mengenai dirinya selaku satu kesatuan sosial yang memiliki batasan.

Dalam pengertian lain masyarakat diartikan oleh Selo Soemardjan sebagai sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Kesimpulan dari pengertian masyarakat ialah sekelompok individu yang mempunyai kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas dan juga dapat diartikan sekelompok orang yang terorganisasi disebabkan memiliki tujuan yang sama dalam masyarakat tersebut.³

Pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari kata "*empowerment*" asal kata yaitu "*power*" yang berarti kekuasaan atau keberdayaan,⁴ pemberdayaan menjadi hal yang lebih sering digunakan di Indonesia sebagai istilah untuk mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*) yang juga menjadi salah satu upaya dalam pembangunan nasional. Dalam pendapat Robbins, Chatterjee & Canda juga mengungkapkan pendapatnya tentang pemberdayaan sebagai berikut: "*Empowerment- "process by which individuals and groups gain power, access to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals"*".

Yang artinya pemberdayaan merupakan proses dimana individu dan kelompok mendapatkan kekuatan, akses sumber daya serta pengawasan atas kehidupan mereka sendiri. Dalam melaksanakan perihal itu, mereka mendapatkan keahlian buat menggapai harapan serta tujuan individu serta kolektif tertinggi mereka dalam mengambil

³ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 2-3.

⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 57.

keputusan bersama. Dari pendapatnya dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan bermakna sebagai upaya dalam memberikan daya (*empowerment*) / penguatan (*strengthening*) bagi masyarakat.⁵

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses memberikan kesempatan serta upaya untuk menciptakan baik dalam bentuk wawasan, keterampilan dan energi tertentu. Peran warga tidak hanya selaku bintang film penting dalam pemberdayaan warga, dalam prosesnya warga pula dibekali dengan keahlian serta wawasan buat bisa meningkatkan serta tingkatkan mutu mereka. Seluruh usaha pemberdayaan yang dicoba bermaksud buat membuat independensi warga. Warga yang mandiri memiliki keahlian bukan buat menikmati hasil dari cara pemberdayaan, tetapi pula mempunyai keharusan buat melestarikan dan dengan cara kontinue melaksanakan pengembangan alhasil berhasil pembangunan yang berkepanjangan.

Kemandirian warga direalisasikan lewat bermacam cara dari memahami serta mengetahui fitah orang selaku orang ataupun selaku insan sosial dalam golongan warga ialah dengan mengefektifkan kemampuan yang terdapat dalam warga guna menambah mutu hidup yang lebih bagus. Cara kemandirian warga mencakup pandangan kehidupan semacam pandangan ekonomi, sosial adat serta area.⁶ Makna pemberdayaan didefinisikan oleh Dharmawan sebagai; “*a proses of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to a source of better living*”.

Kalimat tersebut berartikan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk

⁵ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Warga*, (Alfabeta : 2015), 26.

⁶ Siti Zuliyah, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah”, *Jurnal Ruraland Development*, Vol.1 No.2 (2010) :153.

memiliki kekuatan agar dapat memungkinkan orang guna meluaskan keahlian mereka, serta untuk memiliki daya/kekuatan yang lebih besar buat membuat ketentuan sendiri, dan agar lebih mudah dalam mengakses sumber kehidupan yang lebih baik.⁷

Definisi pemberdayaan masyarakat yang menjadi acuan kebanyakan para ahli yang diungkapkan oleh Tim Deliveri di tahun 2004 bahwa “Pemberdayaan selaku sesuatu cara yang bertitik tolak buat memandirikan warga supaya bisa tingkatkan derajat hidupnya sendiri dengan memakai serta mengakses sumber energi sekitar sebarang mungkin. Cara itu menaruh warga selaku pihak penting ataupun pusat pengoptimalan (*people or community centered development*). Kegiatan pemberdayaan warga ialah cara buat mencapai keselamatan dengan keahlian warga yang mempunyai keahlian buat memaksimalkan sumberdaya yang dipunyai serta kesuksesan sesuatu aktivitas pemberdayaan pula dipengaruhi oleh warga itu sendiri yang turut ikut serta ataupun ikut serta dalam usaha pemberdayaan.

Sebaliknya penafsiran pemberdayaan warga Islam bagi Ibnu Kaldun dengan cara etimologi pengoptimalan atau pemberdayaan mempunyai maksud membina dan tingkatkan mutu warga. Sebaliknya warga Islam ialah berkas orang yang berkeyakinan Islam serta silih berkaitan dan mempunyai ketergantungan ideologis dampingi individunya. Bagi Ibnu Kaldun dari perspektif sosiologis pada dasarnya orang dengan cara orang tiap- tiap diserahkan keunggulan serta pula kekurangan, serta semacam yang kita ketahui keunggulan yang terdapat pada diri tiap orang itu bisa dibuat poin buat bisa mengoptimalkan selaku

⁷ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 26

kemampuan diri untuk membuat kehidupan yang lebih bagus.

Arti lain pula dipaparkan oleh Amrullah Ahmad perihal pengembangan warga Islam kalau pengembangan warga Islam ialah sistem aksi yang dicoba dengan jelas lewat penawaran pengganti yang bisa menolong warga dalam membongkar permasalahan ummah semacam dalam aspek sosial, aspek ekonomi, area yang beralasan pada perspektif agama Islam. Dalam kehidupan ummah ataupun warga tentunya mempunyai bermacam tantangan serta perkara hidup dalam perihal ini aktivitas pemberdayaan warga Islam berusaha buat membagikan pemecahan dalam menuntaskan perkara itu dalam bermacam pandangan kehidupan.

Konsep pemberdayaan masyarakat memiliki pengertian *community development* atau pembangunan masyarakat dan juga mencakup arti *community based developmen* tatau pembangunan yang ditumpukan pada masyarakat. Dan dalam istilah lain juga disebut *community driven development* yang diartikan sebagai pembangunan yang digerakan oleh masyarakat itu sendiri.⁸

Konsep Pemberdayaan dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat selalu diartikan sebagai konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan adanya keadilan. Pemberdayaan menjadikan individu dan sosial sebagai kekuatan terpenting dalam pemberdayaan masyarakat. Rappaport menjelaskan bahwa pemberdayaan dipahami sebagai pemahaman psikologis dari pengaruh kontrol individu yang berkaitan dengan keadaan sosial, kekuatan politik, maupun berbagai hak-hak dalam undang-undang. Dalam suatu kajian menjelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses yang berjalan dengan terus menerus dalam hal meningkatkan kemampuan dan kemandirian

⁸ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV.Pustaka, 2019), 70.

masyarakat yang juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya agar hidup sejahtera.⁹

Pemberdayaan yang merujuk pada kemandirian atau kemampuan orang/masyarakat berhubungan dengan beberapa hal, antara lain: a). Mempunyai akses atas sumber- sumber produktif untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya baik pendapatan, dan moralitas sosial dalam masyarakat, b). Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta hasil keputusan untuk upaya pembangunan masyarakat.¹⁰

Pada umumnya kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha sebagai pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik. Tujuan pendidikan non-formal ini lebih ditekankan pada perubahan perilaku / behavior, yang berawal dari segala hal yang masyarakat tau, kemudian mereka pikirkan, lalu mereka lakukan dan kerjakan secara nyata menjadi perubahan perilaku masyarakat yang dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses pemberdayaan.

Upaya pemberdayaan masyarakat bermaksud buat menghasilkan warga bisa penuh kebutuhannya sendiri dengan mandiri lewat eksploitasi kemampuan yang dipunyai, dan sanggup membongkar permasalahan mereka tanpa pertolongan penguasa ataupun golongan badan kemasyarakatan yang lain. Pemberdayaan warga jadi cara pergantian bentuk yang wajib dimulai dari warga, setelah itu dicoba oleh warga, serta hasilnya buat keselamatan warga itu sendiri. Cara ini berjalan dengan cara alami selaku wujud pelakon sosial yang dalam cara pergantian warga itu.¹¹

⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 26-28.

¹⁰ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 27.

¹¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, 31-33.

Pemberdayaan memiliki makna upaya perbaikan mutu / kualitas hidup menuju kesejahteraan setiap individu maupun masyarakat seperti perbaikan ekonomi (kecukupan pangan), untuk perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), kemerdekaan dalam segala aspek, terjaminnya kedamaian dan keamanan Negara, dan juga terjaminnya hak asasi manusia termasuk perasaan tenang dalam bermasyarakat. Pemberdayaan merupakan salah satu proses agar setiap individu menjadi lebih kuat serta ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan baik dalam pengontrolan, dan hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik kejadian maupun lembaga yang mempengaruhi kehidupan.

Pendapat Sumodiningrat, hakikat pemberdayaan masyarakat adalah salah satu program yang menguapayakan kesejahteraan masyarakat yang berpusat dari manusia dan kemanusiaan,¹² maksudnya pemberdayaan berawal dari kesadaran manusia dan untuk tujuan kesejahteraan manusia itu sendiri. Hal ini tentu menjadi konsep pemberdayaan bahwa bentuk partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pemberdayaan.

Pemberdayaan (*empowerment*) memiliki maksud dan tujuan yang lebih mendalam yang menuju kearah kemampuan serta lebih memiliki peran atau fungsi yang cukup besar dalam membangun masyarakat. Dalam mencapai kesejahteraan, masyarakat merupakan pelaku atau aktor utama sehingga masyarakat menjadi sumber kekuatan dalam menggerakkan pembangunan dimasyarakat. Disini proses pemberdayaan masyarakat Islam yaitu berasal dari potensi yang dimiliki masyarakat untuk dikembangkan, kemudian

¹² Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Alfabeta: 2015) : 29

dilakukan pemberdayaan oleh masyarakat dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pemberdayaan warga ialah cara pemberian sesuatu energi ataupun daya (power) dari sikap serta kemampuan orang maupun warga yang digerakkan oleh pemerintah ataupun atas pemahaman warga itu sendiri yang turut ikut serta dalam aktivitas pemberdayaan. Perihal ini bertujuan supaya warga mempunyai pemahaman buat melaksanakan aktivitas sosial kemasyarakatan buat membenarkan dalam menambah mutu kehidupan yang lebih bagus. Pemberdayaan masyarakat bermaksud buat memandirikan warga dan supaya sanggup buat membenarkan seluruh perkara kehidupan dari bermacam pandangan bagus ekonomi, sosial- budaya serta yang lain serta mampu/sanggup untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa dorongan dari luar warga yang dalam perihal ini pula termasuk mandiri buat tidak memperoleh bantuan dari pemerintah.¹³

Dalam hubungannya dengan pemberdayaan warga dusun mempunyai tujuan buat berikan keahlian pada dusun dalam suatu kelakuan bersama selaku satu kesatuan bagus penguasa, badan ataupun warga dusun yang bisa mengatur ataupun dalam tutur pemberdayaan dikenal eksploitasi sumberdaya yang dipunyai selaku pendukung usaha pembangunan.¹⁴

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa dalam membahas pemberdayaan masyarakat Islam kurang lebih sama halnya ketika membahas pemberdayaan masyarakat, maka berikut ini beberapa tujuan menurut Mardikanto dalam pemberdayaan masyarakat yang salah satunya

¹³ Utang Rasidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sitem Pemerintahan Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 77.

¹⁴ Utang Rasidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sitem Pemerintahan Desa*, 78-79.

sebagai bentuk perbaikan yang ditujukan untuk masyarakat diantaranya yaitu:

- 1) Berusaha dalam koreksi pembelajaran (*better education*) selaku bentuk usaha membagikan pembelajaran yang lebih bagus buat warga.
- 2) Buat membenarkan aksesibilitas (*better accessibility*), paling utama akses kepada data atau inovasi, pangkal pembiayaan, fasilitator produk serta perlengkapan, lembaga ataupun penjualan.
- 3) Pemberdayaan bermaksud buat koreksi aksi (*better action*), dengan dimulai terdapatnya koreksi pembelajaran dan akses buat warga pasti tindakan ini bakal mempunyai akibat buat perilaku warga hari nanti.
- 4) Bermaksud buat pembedulan kelembagaan (*better institution*) ilustrasinya buat meningkatkan kemitraan antar upaya.
- 5) Koreksi usaha (*better business*), buat membenarkan kondisi bidang usaha yang bakal dicoba oleh warga.
- 6) Buat pembedulan pemasukan (*better income*), salah satu tujuannya ialah memandirikan warga mengarah derajat hidup yang lebih bagus, misalnya dalam tingkatkan income ataupun pemasukan warga dengan bidang usaha, tidak hanya berimplikasi pada warga besar tetapi pula mempengaruhi pada pemasukan keluarga.
- 7) Pembedulan area (*better environment*), bila koreksi pemasukan bisa terakumulasi hingga diinginkan hendak tercipta koreksi area bagus yang berbentuk raga ataupun sosial yang lebih bagus buat kehidupan warga.
- 8) Buat koreksi kehidupan (*better living*), sehabis area telah diperbaiki pasti kondisi kehidupan warga bakal lebih bagus.
- 9) Bermaksud dalam koreksi warga (*better community*), bila totalitas perihal diatas sudah dipadati semacam kondisi warga yang lebih bagus bagus raga ataupun sosial hendak

berfungsi buat menciptakan kehidupan warga yang sejahtera.¹⁵

Dalam hubungan dengan tujuan pemberdayaan lewat eksploitasi kemampuan yang dipunyai dusun atau warga ialah buat menolong mendesak independensi warga dengan lewat usaha pengoptimalan kemampuan favorit atau penguatan kelembagaan serta pemberdayaan warga dusun itu.¹⁶ Memberdayakan juga bertujuan untuk melindungi kelompok yang lemah dengan memperkuat akses pelayanan sosial serta pemanfaatan sumber lokal untuk membangun masyarakat. Pembangunan melalui upaya pengembangan kekuatan masyarakat bukan hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga termasuk aspek sosial budaya. Dari aspek sosial budaya pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat harus melibatkan serta mengikutsertakan masyarakat secara langsung.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas sebenarnya beberapa tujuan tersebut antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi hasil pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan akan lebih optimal apabila kegiatan pemberdayaan yang dilakukan didasarkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama dengan melalui upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik pemenuhan dasar masyarakat maupun pemenuhan- pemenuhan lainnya sehingga terwujud kesejahteraan bersama.

c. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Islam

¹⁵Totok Mardikanto, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, (Surakarta: UNS Press, 2011), 127-128.

¹⁶ Ajeng Dini Utami, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat*, (Temanggung: Literasi Desa Mandiri, 2019), 76.

¹⁷ Nunung Unayah, Muslim Sabarisman, "Identifikasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil", *Jurnal Sosio Informan Vol.2, No.1* (2016) : 3.

Pengertian prinsip menurut Mathwe yaitu pernyataan mengenai kebijaksanaan yang dijadikan sebagai pedoman ketika mengambil suatu keputusan serta melaksanakan kegiatannya secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Prinsip dapat juga diartikan sebagai landasan pokok dalam melaksanakan suatu kegiatan.¹⁸ Dari segi konseptual pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dimasa sekarang. Diantaranya seperti kemampuan untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam suatu struktur ekonomi masyarakat maupun kekuasaan masyarakat dalam kehidupannya tersebut. Sedangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Prijono dan Pranarka menjadikan manusia sebagai subjek dalam segala yang dikehendaki dirinya.¹⁹ Prinsip pemberdayaan masyarakat dilandasi oleh kebutuhan masyarakat serta peraturan yang ada dengan peuh nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat sehingga dapat menggerakkan partisipasi masyarakat untuk berdaya.²⁰

Prinsip pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh Dahama dan Bhatnagar bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi:

- 1) Sesuai minat dan kebutuhan, kedua hal ini menjadi satu landasan jika pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif jika menyesuaikan pada minat dan kebutuhan masyarakat untuk lebih diprioritaskan dalam kegiatan pemberdayaan.
- 2) Mencakup Organisasi Masyarakat Bawah, keberhasilan kegiatan pemberdayaan

¹⁸ Totok Mardikanto, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, (Surakarta: UNS Press, 2011), 120.

¹⁹ Totok Mardikanto, *Poerwoko Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Alfabeta: 2015), 51.

²⁰ Totok Mardikanto, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, 76.

- masyarakat juga akan efektif jika ikut melibatkan organisasi masyarakat bawah.
- 3) Keberagaman Kebudayaan, dalam merencanakan kegiatan pemberdayaan perlu disesuaikan dengan budaya local yang ada di masyarakat tersebut.
 - 4) Perubahan Budaya, pemberdayaan pada prosesnya tentu akan berakibat pada perubahan-perubahan yang ada dimasyarakat salah satunya yaitu terjadi perubahan budaya.²¹ Oleh karena itu sebagai penyuluh yang menjadi penggerak kegiatan pemberdayaan untuk lebih hati-hati dan memperhatikan nilai-nilai budaya di masyarakat agar tidak menjadi perubahan yang tidak merubah kearifan masyarakat tersebut.
 - 5) Kerjasama dan partisipasi, menjadi hal yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat.
 - 6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, memberikan kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan suatu ilmu alternatif dalam pemberdayaan termasuk metode dan proses dalam pengumpulan keputusan.
 - 7) Belajar sambil bekerja, pemberdayaan masyarakat juga menjadi media untuk belajar sekaligus bekerja dalam keikutsertaannya dalam membangun masyarakat.
 - 8) Penggunaan metode yang sesuai dengan kondisi lingkungan fisik, kemampuan ekonomi dan social-budaya).
 - 9) Kepemimpinan, yang dalam artinya seorang pemimpin bukan hanya berkuasa namun dapat mengembangkan dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya terutama seorang penyuluh yang juga berperan sebagai pemimpin. Tidak hanya itu seorang penggerak pemberdayaan masyarakat juga mampu untuk menumbuhkan pemimpin lokal

²¹ Totok Mardikanto, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, 121-122.

serta pemimpin yang telah ada untuk melancarkan upaya pemberdayaan.

- 10) Spesialis yang terlatih, sebagai seorang penyuluh atau penggerak pemberdayaan tentunya yang paling tepat yaitu telah melakukan latihan khusus.
- 11) Mencakup keluarga, sebagai satu kesatuan unit sosial masyarakat.
- 12) Kepuasan, hal terpenting dalam bentuk perwujudan keberhasilan pemberdayaan yaitu tercapainya kepuasan. Dengan begitu secara tidak langsung bentuk kepuasan akan berdampak pada kegiatan/ program pemberdayaan berikutnya.²²

Dalam lingkup yang lebih sempit prinsip pemberdayaan warga ialah terdapatnya prinsip kesetaraan, kesertaan warga, prinsip keswadayaan ataupun independensi dalam warga, dan wajib berpendirian berkepanjangan yang tidak cuma buat durasi sesaat tetapi buat waktu jauh selaku usaha pembangunan nasional yang keseluruhannya silih pengaruhi.²³

Sebaliknya dalam novel buatan Muhtadi serta Tantan Hermansyah terdapat sebagian prinsip dalam usaha pengembangan warga Islam, antara lain ialah terdapatnya kesertaan warga serta ikut serta dalam aktivitas pengembangan atau pemberdayaan warga, terdapatnya kesetaraan serta kesamarataan buat kalangan pria ataupun wanita, bersifat demokratis ialah seluruh ketetapan didapat dengan musyawah serta perundingan bersama, bertabiat kejernihan serta akuntabel ataupun dapat dipertanggungjawabkan bagus dari bidang akhlak, teknis, legal, ataupun

²² Totok Mardikanto, *Konsep -Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, (Surakarta: UNS Press, 2011), 120-12.

²³ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 11-12.

administrative, serta keberlanjutan buat kehidupan selanjutnya.²⁴

Pemberdayaan warga sudah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW yang memakai prinsip dengan menjunjung besar kesamarataan, pertemuan dan kesertaan warga dalam aktivitas itu. Tidak hanya itu pula ada prinsip lapang dada yang sudah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW alhasil timbul prinsip buat menghormati etos kegiatan serta silih bantu membantu paling utama dalam melakukan anutan agama. Lebih jelasnya selanjutnya ini sebagian prinsip dalam pemberdayaan warga Islam ;

Pertama, prinsip kesamarataan, dalam Al-Qur’ an tutur kesamarataan dituturkan pada antrean ketiga paling banyak Al- Qur’ an sehabis tutur Allah serta ‘ Ilm, pasti perihal ini meunjukkan kalau kesamarataan sungguh dimuliakan dalam agama Islam. Kesamarataan dimaksud selaku independensi bersyarat dengan adab Islam bila dimaksud selaku keleluasaan tidak terbatas pasti membuat aturan sosial dalam pemberdayaan warga dikhawatirkan hendak cacat atau tidak cocok ajaran agama Islam.²⁵ Dalam Al-Qur’an surat Al- Hadid ayat 25,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul- Rasul Kami dengan bukti-bukti

²⁴ Muhtadi, Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 21-22.

²⁵ Adib Susilo, *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1 No.2 (2016) : 202

yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami ciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa". (Q.S Al Hadid :25).

Bagian itu dengan cara tidak langsung membagikan penafsiran pada kita kalau dalam agama Islam amat menjunjung besar kesamarataan buat semua pemeluk orang, dan membagikan tiap orang peluang yang serupa dalam seluruh pandangan kehidupan. Salah satunya peluang mukmin buat bertugas cocok dengan yang mereka kuasai serta minati dalam penuhi keinginan mereka.

Kedua, prinsip pertemuan yang ialah prinsip yang berdiri atas dasar kepercayaan serta bauh dari prinsip keadilan. Perihal ini merujuk pada prinsip kalau Allah SWT tidak membeda-bedakan mukmin melainkan pada ketaqwaan orang pada Allah SWT, alhasil seluruh orang mempunyai peluang yang serupa supaya bisa berakal untuk keselamatan mereka.

Ketiga, prinsip kesertaan, dimana maksudnya mengaitkan kedudukan dan warga dengan dengan cara langsung serta aktif dalam mengutip ketetapan bersama buat usaha pembangunan diri, kehidupan serta area warga. Pemberdayaan warga dalam Islam wajib sanggup buat bisa meningkatkan dan menguatkan keahlian warga supaya ikut serta dal cara pembangunan itu sendiri.

Prinsip keempat, prinsip penghargaan terhadap etos kerja, etos kerja dalam Islam diartikan sebagai hasil atas suatu kepercayaan muslim, bahwa kerja menjadi hal yang sangat berkaitan dalam kehidupan muslim. Dalam ajaran Islam juga sangat mendorong

umatnya untuk bekerja keras hal ini memuat bahwa terdapat spirit dan dorongan kepada masyarakat agar tumbuh budaya dan etos kerja yang tinggi.²⁶

Prinsip kelima, prinsip bahu- membahu(ta' awun), dalam prinsip ini seluruh orang didorong supaya sanggup buat berkolaborasi dalam seluruh perihal salah satunya dalam menata sistem ekonomi dengan beralasan atas pertemuan serta kesamarataan alhasil membuat prinsip tolong menolong antar tiap orang.²⁷

Sebagian prinsip pemberdayaan warga Islam diatas pada dasarnya ialah wujud pengoptimalan dari anutan agama Islam yang senantiasa berusaha buat menjunjung besar manusiawi serta kesatuan sesama orang. Tidak hanya itu dalam agama Islam pula diajarkan buat legal seimbang, berkolaborasi serta silih bahu- membahu dalam sesuatu aktivitas sosial warga ilustrasinya semacam melaksanakan aktivitas selaku usaha pemberdayaan warga. Kesuksesan pemberdayaan warga pula menginginkan kesertaan warga supaya lebih maksimal buat menciptakan keselamatan bersama. Dengan berpegang pada sebagian prinsip diatas diharapkan hendak memudahkan cara pemberdayaan serta menguatkan jalinan dalam warga supaya usaha pemberdayaan warga bisa serupa dengan apa yang di rencanakan.

d. Model Pemberdayaan Masyarakat Islam

Model pemberdayaan masyarakat dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan yang disertai dengan beberapa kemunculan teori-teori tentang paradigma model pemberdayaan masyarakat di dunia ini. Selanjutnya ini sebagian paradigma yang timbul selaku kemajuan model pemberdayaan warga yang sudah terdapat, antara lain ialah:

²⁶ Adib Susilo, Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.2 (2016) : 201-205.

²⁷ Adib Susilo, Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.2 (2016) : 205.

- 1) Model pemberdayaan masyarakat di Negara berkembang, dalam paradigma ini berpikiran kalau pembangunan selaku usaha pemberdayaan warga hendak berjalan dengan sendirinya bila warga diberi peluang buat mengatur sumber energi alam warga. Dalam paradigma ini ada 3 bentuk pembangunan pemberdayaan ialah awal, bentuk pembangunan warga, bentuk ini mengarahkan kalau masyarakat pedesaan buat mempunyai keahlian sosial, ekonomi, serta politik supaya terkabul warga dusun yang jadi warga modern.²⁸

Bentuk ini dianggap gagal sebab dalam perkembangnya cuma didominasi oleh banyak orang banyak, alhasil banyak orang miskin merasa belum merasakan pemerataan dalam pembangunan. Kedua, bentuk kesertaan orang dalam pembangunan, yang bertumbuh semenjak tahun 1970- an yang muncul atas kesedihan atas paradigm pembangunan“ trickle down effect” yang artinya pembangunan terjalin pada kalangan atas lebih dulu setelah itu baru kalangan bawah.

Dalam bentuk ini pula belum sukses dalam usaha pembangunan warga, salah satu sebabnya sebab bentuk ini menyangka cetak biru atau program pembangunan yang diusulkan warga cuma selaku wujud kemauan warga saja alhasil penguasa tidak menganggapnya dengan intensitas dalam usaha penerapannya. Ketiga, bentuk desentralisasi yang maksudnya pembangunan diserahkan pada pemerintah tingkatan dasar buat

²⁸ Model pembangunan masyarakat pertama kali dikembangkan oleh pemercolonial Inggris di Etawah, maupun di India sejak tahun 1920, yang kemudian dijadikan paradigma dalam pembangunan desa di negara-negara berkembang. Dalam model ini dianggap gagal karena model ini melupakan bahwa masyarakat tidak bersifat homogen yang terdapat golongan kaya dan juga golongan miskin sehingga jika dalam prosesnya hanya didominasi oleh orang kaya di desa, tentu akan membuat pemerataan dan keadilan dimasyarakat tidak efisien. Adib Susilo, Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam, Falah:Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1 No.2 (2016), 198.

dengan cara langsung melakukan program pembangunan yang telah direncanakan serta disetujui penguasa pusat. Sehabis kedatangan bentuk ini dengan cara lama- lama telah membuktikan kemajuannya cuma saja sebab penerapannya dipantau serta bersumber pada oleh kebijaksanaan penguasa wilayah pasti ada campur tangan dari pemerintah pusat serta menimbulkan warga lokal belum seluruhnya menyambut khasiat dari usaha pembangunan itu.²⁹

- 2) Bentuk pemberdayaan warga di Indonesia, yang berusaha buat mensejahterakan warga antara lain; Pertama, bentuk pembangunan nasional dengan berorientadi pada perkembangan. Bentuk ini mempunyai fokus buat perkembangan nilai pemasukan Nasional selaku kenaikan hasil GNP per- tahun alhasil mendobrak pada nilai perkembangan 7 persen ataupun lebih. Sayangnya bentuk ini belum berpusat pada usaha penghapusan kemiskinan, pengangguran ataupun ketidakadilan. Kedua, bentuk pembangunan yang mengarah atas keinginan dasar, dalam bentuk ini melaksanakan aktivitas pembangunan dengan usaha pelampiasan keperluan dasar warga dan memperoleh pemasukan serta akses pembelajaran, kesehatan, air bersih, pemindahan, pencerahan ataupun keinginan dasar yang lain. Ketiga, bentuk pembangunan yang berfokus pada orang. Dengan cara singkatnya dalam bentuk ini menyangka kalau bukan cuma ekonomi serta terpenuhinya keinginan dasarmasyarakat tetapi dalam pandau pembangunan sungguh dibutuhkan kesertaan warga ataupun keikutsertaan warga dengan cara jelas selaku cagak kesuksesan pembangunan nasional. Dalam bentuk ini dikira sangat masuk ide kala diaplikasikan di Indonesia

²⁹ Adib Susilo, Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam, *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.2 (2016), 198.

supaya warga pula turut ikut serta dalam usaha pembangunan.³⁰

Dari sekian banyak filosofi bentuk pemberdayaan di atas pengarang lebih mengarah pada teori yang diungkapkan oleh Jack Rothman (1974) yang telah diterangkan dalam buku buatan Harry Hikmat(2010) menata serta merumuskan sebagian bentuk dalam suatu aktivitas pembangunan warga yang dipecah jadi 3 antara lain:

- 1) Model Pengembangan Lokal (*Locality Development Model*), dalam bentuk ini menarangkan kalau pergantian yang terjalin di warga bakal maksimal apabila warga diikutsertakan dalam partisipatif warga dalam tingkatan lokal, bagus pada langkah penetapan tujuan dini dan cara penerapan selaku usaha aksi perubahan.³¹ Pengembangan warga lokal lebih mengarah pada” tujuan cara” bukan berpusat pada tujuan kewajiban ataupun tujuan hasil. Alhasil warga bertanggung jawab dalam memastikan tujuan serta memilah metode yang pas dalam menggapai tujuan itu.³² Guna dari bentuk ini menganggap seluruh susunan warga, bagus tokoh agama, tokoh warga, warga besar turut ikut serta supaya mendapatkan hasil yang maksimal.
- 2) Model Perencanaan Sosial (*Social Planning Model*), bentuk ini lebih mementingkan pada cara jalan keluar permasalahan sosial yang biasa dengan cara teknis semacam kenakalan anak muda, perumahan, kawasan tinggal, kesehatan, pembelajaran ataupun yang yang lain. Bentuk ini pula amat memprioritaskan tentang

³⁰ Adib Susilo, Model Pemberdayaan Masyarakat., *Falah:Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.2 (2016), 199-200.

³¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 25-26

³² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Adita, 2017), 42-44

bagaimana cara perencanaan dan semua perubahan dikendalikan dengan baik supaya tujuan akhir cocok dengan perencanaan. Bentuk ini mempunyai guna buat bisa mengonsep serta membuat pergantian yang valid alhasil pemograman yang disetujui oleh warga dalam menanggulangi penyelesaian permasalahan sosial itu supaya bisa terwujud cocok dengan konsep yang diharapkan. Dengan pemograman atas sesuatu permasalahan sosial ini menyebabkan perencanaan bisa bertabiat sedangkan serta senantiasa, dibidang sedangkan bila dalam hasil penyelesaian permasalahan berlainan dengan perencanaan, serta senantiasa bila cocok antara perencanaan ataupun penerapan penyelesaian permasalahan sosial itu.

- 3) Model Aksi Sosial (*Social Action Model*), dalam bentuk ini mementingkan pada metode buat menanggulangi golongan masyarakat dengan cara sistematis, terencana serta sistematis, contohnya menggerakkan satu kalangan ataupun lebih supaya turut ikut serta aktif dalam perubahan. Bentuk ini mempunyai tujuan buat menciptakan pergantian yang pokok pada warga, tidak hanya itu bentuk pemberdayaan ini menekankan pemerataan kewenangan dan sumberdaya dan seluruh jenjang cara dalam usaha pemberdayaan warga. Kelakuan sosial mengarah pada 2 perihal bagus pada tujuan cara serta tujuan hasil. Dalam perihal ini warga diorganisir dengan lewat jenjang penyadaran, pemberdayaan serta perilaku nyata dalam usaha mengganti bentuk kewenangan buat penuh prinsip kerakyatan, pemerataan(equality) dan kesamarataan(equity) pada semua warga.³³

³³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 25-26.

2. Wisata Religi

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 2009 mengenai kepariwisataan dalam artikel 1 dipaparkan kalau darmawisata merupakan aktivitas perjalanan yang dicoba oleh seorang ataupun segerombol orang dengan mendatangi tempat khusus buat tujuan tamasya, pengembangan individu, ataupun menekuni karakteristik daya tarik darmawisata yang didatangi dalam periode waktu sedangkan.

Wisata yakni aktivitas ekspedisi ataupun beberapa dari aktivitas itu yang dicoba dengan cara ikhlas dan bersifat sedangkan buat menikmati subjek serta daya tarik darmawisata dalam sesuatu destinasi wisata. Mutu destinasi atas kemampuan daya tariknya ditetapkan oleh 4 perihal ialah: pementasan, amenitas, aksesibilitas, serta badan pengelolaannya.³⁴

Sebaliknya agama dalam bahasa Indonesia serupa maksudnya prinsip keyakinan pada tuhan dengan syariat khusus. Kata agama berawal dari bahasa sanskerta yang berarti tidak rancu, agama semakna dengan kata “*Religion*” (Bahasa Inggris), “*Religie*” (Bahasa Belanda), “*Religio*” (Bahasa Latin), yang maksudnya mencermati terkumpul atau bersama, mengambil serta membagi.

Sementara itu wisata religi adalah jenis wisata yang di kategorikan dalam wisata minat khusus. Wisata minat khusus menekankan pada ketertarikan (*interest*) yang sangat khusus dari wisatawan yang “*are traveling to learn a bout and experince particular specific features related to an area*”. Ketertarikan ini dapat berupa hobi atau kesenangan tertentu yang mewujudkan dalam bentuk perjalanan wisata. Mengistilahkan wisata ini sebagai “*active tourism*”, dimana “*the active involvement of travvellers in the cultural and/ or physical environment they are visiting is regarded as a key element of special intererest travel*”. Beberapa kegiatan wisata tertentu dapat dikategorikan kedalam wisata minat khusus, misalnya

³⁴ Marsono Fahmi Prihantoro, Dkk, *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus, Terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan sosial Budaya*, (Yogyakarta, UGM Gajah Mada University Press, 2016), 7.

wisata pendidikan (*educational travel/ tourism*), wisata seni dan peninggalan sejarah (*art and heritage tourism*), wisata etnik (*ethnic tourism*) wisata pertualangan, olahraga, dan kesehatan (*adventure, sport and health tourism*), dan termasuk wisata religi.

Ada pula penafsiran lain mengenai wisata religi merupakan salah satu tipe produk darmawisata yang berhubungan akrab dengan bagian religius ataupun keimanan yang dianut oleh pemeluk orang. Wisata religi dimaknai selaku aktivitas darmawisata ke lokasi yang mempunyai arti spesial untuk pemeluk berkeyakinan, umumnya sebagian tempat ibadah yang mempunyai keunggulan. Ini misalnya diamati dari bagian asal usul, terdapatnya dongeng serta hikayat hal tempat itu, atau karakteristik serta kelebihan arsitektur bangunannya. Wisata religi ini banyak di kaitkan dengan hasrat serta tujuan si turis buat mendapatkan bantuan, ibrah, tausiah, serta kearifan kehidupannya. Namun tidak tidak sering pula buat tujuan khusus semacam menemukan berkat, daya hati, kekuatan kepercayaan apalagi kekayaan banyak.

Dengan demikian, darmawisata religi sungguh disukai oleh banyak turis bisa diamati dari banyaknya warga yang melaksanakan kunjungan ke makam- makam para orang tua, para malim serta para kiyai yang dikira mempunyai karomah khusus, semacam mendatangi makam- makam atau langgar aset asal usul yang terdapat di kota Kudus. Banyak alibi dari mereka buat mendatangi tempat- tempat darmawisata religi itu semacam mau mengharapkan para orang tua, malim serta kiyai namun adapula yang melaksanakan praktek- praktek menyesatkan semacam impian yang dialamatkan pada makam- makam orang tua buat mengharapkan dirinya biar terakbul seluruh hajat hidupnya. Darmawisata religi ialah salah satu kejadian yang dikala ini mulai memasyarakat, darmawisata religi ini kerap dijadikan selaku aktivitas tradisi bagus bulanan, tahunan serta serupanya.

3. Kesejahteraan

Berbicara terkait kesejahteraan, hal ini tidak dapat dipisahkan dari makna kemandirian. Pada hakikatnya kesejahteraan ditandai dengan adanya situasi atau keadaan yang mana pribadi atau individu berada dalam keadaan yang menyenangkan atau membahagiakan. Banyak sekali ungkapan kesejahteraan yang pernah diungkap oleh masyarakat Jawa tentang "*gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem, kerto raharho*" ungkapan tersebut mengandung arti bahwa kesejahteraan identic dengan ketentraman, berkecukupan, dan dapat mandiri tanpa bantuan orang lain.³⁵ Selain itu kesejahteraan ditandai dengan keadaan masyarakat yang awalnya dalam kondisi terpuruk atau rendah menjadi masyarakat yang hidup dalam kondisi yang lebih baik.

Berkaitan dengan kesejahteraan sosial dalam masyarakat sudah diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU RI No 6 Tahun 1974, dimana dijelaskan bahwa arti kesejahteraan sejati apabila masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya secara sosial, material, maupun spiritual dalam hal jasmani maupun rohaninya serta mempertahankan hak dan kewajibannya sesuai dengan Pancasila. Dari UU tersebut tertera jelas bahwa kesejahteraan sosial tertera dalam Pancasila sila ke 5 (kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), yang mana dalam mewujudkan dan penerapannya perlunya keadilan pembangunan secara merata agar masyarakat memperoleh kebahagiaan. Agar tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat maka perlunya upaya pemeliharaan taraf pola pikir masyarakat agar bisa meningkatkan kuantitas SDM yang ada maka perlunya upaya pemberdayaan masyarakat.

³⁵ Maspaitella dan Naney Rahakbauwi, "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial", *Jurnal Aspirasi Vol.5 No.2* (2014), 158. Diakses pada 18 Oktober\ 2020, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php.anspirasi/article/view/457/354>

Mengenai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka perlunya peningkatan kualitas hidup dan mengembangkan kuantitas maupun potensi yang ada dalam diri masyarakat. Kesejahteraan sosial mempunyai maksud pada kondisi yang baik, kebahagiaan serta kelimpahan, banyak orang yang menamainya selaku aktivitas kebaikan. Menurut Segel serta Bruzy tahun 1998, Kesejahteraan sosial merupakan situasi aman dari sesuatu warga yang mencakup kesehatan, kondisi ekonomi, keceriaan, serta mutu hidup orang.³⁶

Keselamatan sosial selaku sistem yang sistematis dari layanan serta lembaga sosial, yang didesain buat menolong orang serta golongan supaya menggapai tingkatan hidup serta kesehatan yang melegakan. Artinya supaya terwujud hubungan- hubungan perorangan serta sosial yang berikan peluang pada individu- individu pengembangan keahlian mereka seluas mungkin serta tingkatan keselamatan mereka cocok dengan keperluan warga.

Situasi kesejahteraan sosial dilahirkan atas kompromi 3 bagian. Pertama, sepanjang mana permasalahan sosial ini diatur, kedua sepanjang mana kebutuhan- kebutuhan dipadati, ketiga sepanjang mana peluang buat tingkatan derajat hidup bisa diadakan. Rancangan keselamatan bagi Nasikun bisa diformulasikan selaku bandingan arti dari rancangan martabat orang yang bisa diamati dari 4 indicator yakni: (1) Rasa aman (*security*), (2) Kesejahteraan (*welfare*), (3) Kebebasan (*freedom*), dan (4) Jati diri (*Identity*).

Dalam menguasai kenyataan tingkatan kesejahteraan, pada dasarnya ada sebagian aspek yang menimbulkan terbentuknya kesenjangan tingkatan kesejahteraan antara lain: (1) sosial ekonomi rumah tangga ataupun warga, (2) bentuk aktivitas ekonomi sektoral yang jadi dasar aktivitas penciptaan rumah tangga

³⁶ Rofiq A, dkk., *Pemberdayaan Pesantren* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005), 61.

ataupun warga,⁽³⁾ kemampuan regional (sumber daya alam, area serta insfrastruktur) yang pengaruhi kemajuan bentuk aktivitas penciptaan, serta (4) situasi kelembagaan yang membuat jaringan kegiatan produksi serta penjualan pada rasio lokal, regional serta garis besar.

Sering kali kesejahteraan tidak bisa terlepas dari arti kemandirian. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila masyarakatnya secara aspek jasmani maupun rohaninya mandiri dalam hal apapun. Kemandirian merupakan ambisi buat melakukan seluruh suatu untuk diri sendiri yang direalisasikan dalam pandangan daya cipta serta keahlian menghasilkan. Independensi ini mencakup seluruh pandangan dalam kehidupan, seseorang dapat dibilang mandiri bila dapat melakukan sesuatu perihal dengan sendirinya tanpa bantuan individu lain dalam perihal pelampiasan keinginan akan sandang, papan, pangan.³⁷

Kemandirian ialah salah satu tindakan yang wajib dipunyai tiap orang. Mandiri berarti kekuatan mengontrol dirinya sendiri bagus aksi tindakan tidak terkait pada orang lain serta senantiasa menjajaki kemauannya sendiri. Kata mandiri serupa maksudnya dengan autonomy ialah sesuatu kondisi pengaturan diri sendiri. Penafsiran kemandirian bagi Stainberg berkata kalau sebutan kemandirian berawal dari tutur independence merujuk pada kapasitas orang buat menganggap diri sendiri. Rancangan independence menarangkan kalau anak yang telah menggapai sanggup melaksanakan ataupun melaksanakan sendiri kegiatan hidup terbebas dari akibat kontral orang lain.³⁸

³⁷ Anis Masykur, *Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren*, (Depok: Barnea Pustaka, 2010), 57.

³⁸ Nasran, "Peran Ponok Pesantren dalam Pembinaan Karakter Disiplin dan Kemandirian Santri (Studi Pondok Pesantren IMMIM Putra Makassar)," *Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 1* (2012). Diakses pada 20 September 2019, <http://eprints.unm.ac.id/12227/>

Hubungan Kemandirian serta kesejahteraan dalam pemberdayaan warga. Kemandirian serta keselamatan jadi salah satu tujuan dari terdapatnya pemberdayaan warga. Disini warga diharapkan buat mandiri ataupun berdiri sendiri sebab warga perlunya usaha pemberdayaan warga. Sebutan pemberdayaan warga selaku alih bahasa dari kata "*empowerment*" yang maksudnya menghilangkan kekurangan. Bagi Sumodiningrat pemberdayaan warga wajib dicoba lewat 3 rute, ialah menghasilkan hawa yang membolehkan kemampuan warga bertumbuh (*enabling*), memantapkan kemampuan daya yang dipunyai warga (*empowering*), membagikan proteksi (*protecting*). Disini pemberdayaan warga ialah sesuatu usaha tingkatkan keahlian warga supaya sanggup menciptakan kemandirian serta membebaskan diri dari argari kekurangan dan keterbelakangan.⁵³

Konsep pemberdayaan dalam artikel pembangunan umumnya berhubungan dengan rancangan kemandirian, kesertaan, jaringan kegiatan serta kesamarataan. Disini perlunya kesertaan warga selaku perihal terutama dalam usaha perkembangan independensi serta cara pemberdayaan warga. Strategi pemberdayaan menaruh kesertaan warga selaku isu pertama pembangunan dikala ini. Searah dengan ini pemberdayaan bisa dimaksud selaku usaha kenaikan keahlian warga(miskin, marjinal, terpinggirkan) buat mengantarkan opini serta ataupun keinginan, antara lain ikut serta, bernegoisasi, pengaruhi, serta mengatur kelembagaan warga untuk koreksi kehidupan yang mandiri serta terciptanya kesejahteraan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dijalankan Moh Rosyid tahun 2019, dengan judul "Mempertahankan Tradisi Studi Budaya Di Kampung Kauman Menara Kudus",³⁹ pada penelitian ini

³⁹ Moh Rosyid, "Mempertahankan Tradisi Studi Budaya Di Kampung Kauman Menara Kudus," *Jurnal Patanjala* Vol.11 No.2 (2019), Diakses pada 18 Oktober 2020.

lebih menekankan pada upaya mempertahankan tradisi di Desa Kauman diantaranya peringatan khoul Sunan Kudus dan mempertahankan pantangan dari Sunan Kudus. Adapun kesamaan dalam penelitian tersebut dengan yang dikaji peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, dengan objek yang sama di Desa Kauman. Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti cakupannya lebih luas yaitu menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui filosofi gusjigang untuk meningkatkan kesejahteraan yang semuanya di pimpin oleh kepala desa dan juru kunci makam bersama-sama masyarakat sekitar serta pada penelitian yang dilakukan peneliti tertuju pada potensi desa Kauman secara filosofi gusjigang maupun faktor pendukung dan penghambatnya.

2. Penelitian yang dijalankan Hasan Bastomi tahun 2019 yang berjudul "Filosofi Gusjigang Dalam Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam Kudus".⁴⁰ Penelitian tersebut menekankan pada filosofi gusjigang bagus (akhlak), ngaji (suka nuntut ilmu) dan dagang (bisnis) yang mana diterapkan bagi program dakwah pengembangan masyarakat Islam yakni mengajak pada kebaikan dan kebenaran (*wayamuruna bil ma'ruf*) dan mencegah keburukan (*wayanhauna anil munkar*). Adapun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang filosofi gusjigang. Perbedaannya penelitian yang dilakukan Hasan Bastomi tertuju pada dakwah pengembangan masyarakat Islam, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti tertuju pada upaya pemberdayaan masyarakat Islam guna meningkatkan

https://www.researchgate.net/publication/335235713_MEMPERTAHANKAN_T_RADISI_S_TUDI_BUDAYA_DI_KAMPUNG_MENARA_KUDUS

⁴⁰ Hasan Bastomi, "Filosofi Gusjigang dalam Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol.3 No.1* (2019), 66. Diakses pada 18 Oktober 2020, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/comdev/article/view/5625/3567/>

kesejahteraan di Desa Kauman Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

3. Penelitian yang dijalankan Ima Nur Halimah (Skripsi 2019) dengan judul "Pengelolaan Desa Wisata Religi Di Desa Kauman Kudus Jawa Tengah Perspektif Dakwah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan yang berkaitan dengan destinasi wisata maupun tradisi Desa Kauman tiap tahun mengalami perbaikan, 2) terdapat kerjasama pengurus menara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 3) berkaitan dengan dakwah, aspek pengelolaan wisata dapat dilihat kedalam berbagai kegiatan keagamaan.⁴¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan berobjek yang sama yaitu Desa Kauman. Adapun perbedaan terletak pada, penelitian yang dilakukan Ima Nurhalimah menekankan pada aspek pengelolaan wisata Sunan Kudus dalam kegiatan dakwahnya, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada upaya pemberdayaan masyarakat Islam melalui gusjigang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Kerangka Berfikir

Desa Kauman ialah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus yang mana desa ini dianggap desa bersejarah karena didalamnya terdapat makam Sunan Kudus, Masjid dan menara Kudus. Desa Kauman merupakan desa kecil yang di dalamnya masih ada bangunan kuno zaman dahulu dengan dinding-dinding menjulang tinggi dan ada pagar yang tinggi mengelilingi rumah . Adapun penduduknya di desa ini sekitar 439 orang dengan 228 laki-laki 211 perempuan dengan data pada tahun 2017.

Desa Kauman memiliki batas wilayah sebelah timur Desa Langgar dalem, baratnya berbatasan dengan Desa

⁴¹ Skripsi, Fakultas Dakwah/ MD, Ima Nur Halimah, "Pengelolaan Desa Wisata Religi Di Desa Kauman Kudus Jawa Tengah Perspektif Dakwah" (UIN Walisongo, 2019).

Damaran, sebelah selatan Desa Janggalan, utaranya berbatasan dengan Desa Kajeksan. Peneliti melakukan penelitian di Desa ini karena desa ini memiliki keunikan salah satunya adanya rumah adat yang kuno, telah menerapkan desa wisata religi dalam kehidupan sehari-harinya terlihat pada kegiatan keagamaan seperti pengajian umum, pelestarian budaya buka luvur dan lain-lain, selain itu mulai meningkatnya perekonomian terbukti semakin tingginya pendapatan masyarakat, terbuka lapangan kerja ada yang jadi pengasuh makam Sunan Kudus, penyewaan toko, kios, tukang parkir yang kesemuanya tidaka dapat dipisahkan dari kerjasama dengan pengelolaan wisata Sunan Kudus yang mana dalam hal ini bisa dikategorikan ke dalam pemberdayaan masyarakat Islam.

Pemberdayaan masyarakat Islam ialah suatu kondisi dimana adanya peningkatan harkat martabat lapisan masyarakat yang mana dari tidak mampu terbelakang menjadi mampu dan mandiri demi terwujudnya kesejahteraan. Namun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi upaya pemberdayaan tersebut. Disini terdapat faktor pendukung maupun penghambat masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

